

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara yang perekonomiannya sangat maju di dunia. Hal ini dapat dilihat dari GDP (produk domestik bruto) yang dihasilkan oleh Jepang dalam setahun. Jepang memiliki produk andalan dan terkenal dari perusahaan multinasional Jepang yaitu seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic yang telah menjadikan Jepang sebagai negara kedua tertinggi dari aspek GDP dan menjadikan Jepang sebagai negara yang terkenal di dunia. Selain perkembangan perusahaan multinasionalnya, Jepang juga terkenal sebagai negara dengan industri manufaktur yang menjadi salah satu kekuatan Jepang saat ini. Salah satu bidang yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang adalah teknologi robot. Adapun robot yang telah dikembangkan adalah seperti ASIMO dan robot *humanoid* yang berbentuk seperti manusia yang di produksi oleh Honda (Kedutaan besar Jepang di Indonesia).

Selain dalam hal teknologi dan manufaktur, Jepang juga memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk di jadikan destinasi wisata asing. Seperti Indonesia, Jepang adalah negara bentuk kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas ketimbang daratan. Jepang mempunyai banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat internasional (Shindo, 2015). Jepang juga merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaannya. Sebagai contoh budaya yang ada di Jepang adalah budaya minum teh dan merangkai bunga. Juga ada adat dan budaya tradisional seperti Kabuki yaitu pertunjukan seni drama yang dimainkan di atas panggung, seni bela diri Sumo dan lainnya.

Banyaknya ragam ciri khas yang ada di Jepang membuat negara ini di tahun 2017 masuk ke dalam daftar 10 destinasi wisata yang paling banyak dicari di situs

pencari perjalanan *Skyscanner* khususnya oleh wisatawan Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama muslim. Dua kota di Jepang yaitu Osaka dan Tokyo adalah contoh dari wilayah yang sering dikunjungi oleh wisatawan Indonesia di tahun 2017 pada saat itu. Lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu saat pertama kalinya jumlah wisatawan asing menembus angka di atas 10 juta orang dan diantaranya 300.000 orang adalah wisatawan muslim. Meningkatnya jumlah wisatawan asing dan wisatawan muslim ini membuat para pelaku bisnis yang ada di Jepang bersemangat untuk memulai bisnis halal di Jepang.

Jika kita lihat keragaman agama yang ada di Jepang, jumlah penduduk yang menganut agama Islam sangat sedikit. Penduduk Jepang sebanyak 51.2 % adalah menganut agama Shinto, 43 % beragama Budha, 1.0 % beragama Kristen, sementara agama Islam belum lama dikenal oleh sebagian besar masyarakat Jepang (Wahidati & Sarinastiti, Perkembangan Wisata Halal di Jepang, 2018). Oleh karenanya makanan yang bisa dikonsumsi oleh muslim (makanan halal) menjadi suatu hal yang penting. Produk-produk makanan halal yang sedang *booming* di Jepang bahkan dimanfaatkan oleh badan pariwisata di berbagai daerah mulai dari Hokkaido sampai dengan Okinawa, dengan cara membuat brosur penjelasan khusus bagi kalangan wisatawan muslim (Kementerian Perdagangan, 2015).

Munculnya wisatawan muslim ini menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan para pelaku bisnis dan pemerintah membuat sebuah kepercayaan dari para wisatawan agar dapat selalu dengan nyaman berwisata di sekitar Jepang. Sertifikasi halal terhadap makanan dinilai sangat penting bagi para wisatawan yang sedang berkunjung ke Jepang. Sertifikasi halal mulai digalakan pada tahun 2013. Dimana tahun 2013 mulai terkenalnya wisatawan muslim karena jumlahnya yang terbilang banyak ke Jepang. Pada tahun tersebut jumlah wisatawan muslim yang masuk ke negara Jepang sangat tidak di duga

oleh pemerintah dan masyarakatnya. Dimana lebih dari 300.000 masyarakat Islam atau pengunjung muslim yang berasal dari berbagai negara muslim mulai tertarik berkunjung ke Jepang.

Tahun ini juga sebagai tanda dimulainya kebijakan sertifikasi halal yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga – lembaga halal di Jepang karena pemerintah merasa membutuhkan faktor pendukung yang membuat jumlah wisatawan muslim bertambah. Dimulainya kebijakan dan promosi tentang sertifikasi halal di Jepang juga berdasarkan dengan kebutuhan dan pelayanan untuk para wisatawan muslim Jepang. Belum adanya sertifikasi halal di berbagai tempat makan dan fasilitas halal di Jepang akan sangat mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan yang mulai merasa gusar ketika berkunjung ke Jepang dengan tujuan destinasi kuliner.

Sebuah kota yang dikenal menjadi titik awal dikenalnya Islam di Jepang adalah kota Kobe, dimana kota ini menjadi sebuah kota pusat perkembangan Islam di Jepang yang kemudian turut serta dalam mempromosikan Jepang sebagai sebuah negara yang ramah dengan masyarakat muslim. (Nasution, 2017). Keseriusan pemerintah Jepang dalam memberikan pelayanannya dan untuk memberikan kenyamanan wisata muslim dibuktikan dengan kebijakan ‘*Visit Japan*’ ke berbagai negara muslim dengan hasil Jepang menjadi pemenang dalam ‘*World Best Non OIC Emerging Halal Destination*’ pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Abu Dhabi, UEA” (Sarinastiti, 2017).

Kemenangan tersebut secara langsung memberikan keyakinan kepada para wisatawan dan masyarakat muslim yang ada di Jepang maupun yang akan pergi ke Jepang dalam industri makanan. Kemenangan Jepang dalam acara yang dilaksanakan di Abu Dhabi tersebut juga merupakan bentuk dukungan kepada Jepang dan seluruh masyarakatnya untuk terus meningkatkan kualitas makanan dan sertifikasi makanan halal. Tulisan ini akan menjelaskan wisata makanan halal yang ada di Jepang,

dengan menitikberatkan pada alasan pemerintah Jepang dalam memberlakukan kebijakan sertifikasi halal pada masyarakat Jepang yang mayoritas non-muslim yang justru mengambil kebijakan pemberlakuan sertifikasi atau labelisasi makanan halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu **“Mengapa pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan sertifikasi halal ?”**

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka penulis mencoba mencari jawaban dengan menggunakan konsep diplomasi ekonomi dan “theory system atau teori pembuatan keputusan politik luar negeri atau “*decision making theory*” yang dikemukakan oleh David Easton yang juga sering disebut sebagai analisa sistem politik.

1. Konsep Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi diartikan sebagai realisasi dari berbagai aktivitas yang tujuan untuk memperoleh kepentingan ekonomi negara asal. Dalam sudut pandang para pengusaha atau para pelaku bisnis, yang memerankan pemerintah itu penting dalam kaitannya untuk mempromosikan sebuah peluang bisnis dan yang mengarahkan para pelaku bisnis agar dapat meraih keuntungan yang maksimal. Diplomasi ekonomi menjelaskan fenomena peran dan kegunaan atau fungsi aktor diplomatik post-modern. Menurut defisini dari G.R Berridge dan Alan James (2003) yaitu :

“ Economic diplomacy is concerned with economic policy issues, e.g. work of delegations at standard setting organisations such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and advise the

government on how to best influence them. Economic diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called 'economic statecraft' “

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh G.R Berridge dan Alan James tersebut mengartikan diplomasi ekonomi adalah sebuah upaya untuk merumuskan metode yang paling baik didalam pengambilan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pertukaran jasa, barang, tenaga kerja, atau sumber daya produksi dalam lingkup internasional. Diplomasi ekonomi dipahami untuk memperluas terminologi diplomasi yang tidak hanya berkaitan tentang hubungan antar negara di sistem internasional tetapi juga berhubungan langsung dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik antar aktor politik baik secara formal ataupun informal.

Istilah diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai rangkaian metode dan proses dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor, impor, investasi, hutang, bantuan, tenaga kerja dan imigrasi. Bukan hanya aktor negara saja yang menjalankannya akan tetapi aktor non negara juga yang melakukan sesuatu hal untuk mencapai kepentingan ekonominya (Azizah, M.Si., et al., 2016).

Diplomasi ekonomi ini merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh Jepang sebagai sebuah negara yang sedang berusaha dalam meningkatkan hubungan ekspor impornya terhadap makanan halal dengan mitra negara – negara muslim di dunia khususnya Indonesia, Malaysia, dan negara – negara Timur Tengah. Lalu, usaha yang dilakukan Jepang terhadap upaya peningkatan jumlah wisatawan muslim adalah dengan gencarnya melakukan promosi wisata halal di Jepang. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim melihat bahwa makanan – makanan

produksi Jepang adalah makanan yang lezat dan berciri khas kuat akan Jepang serta *trend* halal dan wisata muslim dikalangan masyarakat pada saat ini. Jepang juga melihat dengan mulai masuknya jumlah wisatawan asing muslim yang masuk ke Jepang semakin bertambah, maka diperlukannya impor makanan – makanan yang dapat dikonsumsi oleh para wisatawannya. Hubungan luar negeri dibidang ekspor impor ini sangat membantu sebuah usaha Jepang dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Jepang dan perekonomiannya. Kegiatan ekspor dan impor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di banyak negara khususnya Jepang yang saat itu sedang ingin memperbaiki perekonomiannya pasca bencana alam.

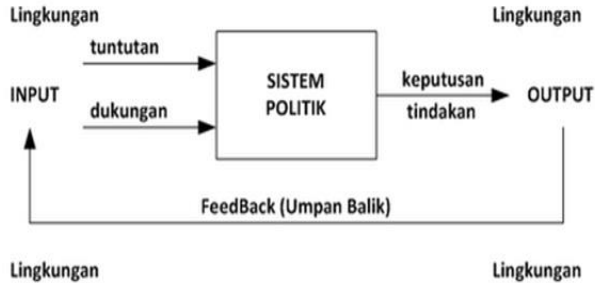
2. Teori Pembuatan Keputusan

Teori pembuatan keputusan (*decision making theory*) yang dikemukakan oleh David Easton yang juga sering disebut sebagai analisa sistem politik. Untuk menganalisa sebuah sistem politik, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari sistem dan politik menurut David Easton yaitu sistem politik adalah yang memiliki batasan merupakan alokasi dari pada nilai-nilai, dimana pengalokasiannya tersebut bersifat memaksa atau dengan kewenangan dan pengalokasian tersebut mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstaksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat (Haryanto, 1982).

Menurut David Easton, sistem politik memiliki empat ciri khas, pertama ciri-ciri identifikasi dimana ciri identifikasi berguna untuk menggambarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit itu dari unit-unit yang ada diluar

sistem politik. Kedua, *input* dan *output* masyarakat tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem politik. Ketiga, diferensiasi dalam suatu sistem pembagian kerja yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan itu. Dan keempat yaitu integrasi dalam suatu sistem dimana mekanisme yang digunakan untuk bekerjasama walaupun dalam kadar minimal sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang otoritatif atau kekuasaan yang mengikat. (Andrews & Mas'ood).

Dalam analisa ini digambarkan bahwa sebuah kebijakan dalam negeri sebuah negara Jepang yang dibuat melalui beberapa tahapan atau proses yaitu proses *input*, proses konversi, dan proses *output*. Hasil dari konversi yang telah disahkan oleh badan yang berwenang akan menjadi sebuah kebijakan yang bersifat otoritatif. Kemudian diimplementasikan kepada masyarakat yang kemudian akan menghasilkan sebuah *feedback* atau umpan balik dari masyarakat atas sebuah kebijakan baru. Respon tersebut akan kembali menghasilkan *input* baru berupa dukungan jika respon masyarakat positif dan berupa tuntutan baru jika respon masyarakat negatif, lalu akan dilanjutkan dengan konversi yang akan menghasilkan output baru. Dengan bantuan kerangka konseptual ini kita bisa menjelaskan mengapa suatu sistem bergerak, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam sistem itu dan bagaimana sistem itu mengadaptasikan dari sesudah menerima umpan balik. (Mas'ood & Andrews, 1990).

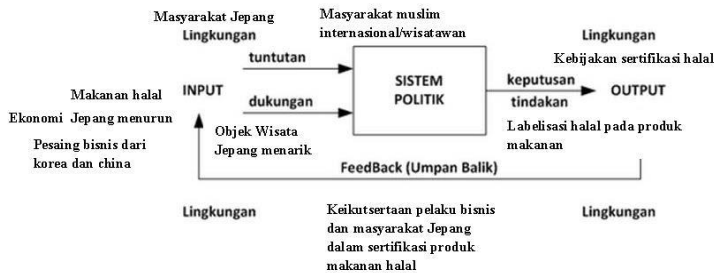


Gambar 1. 1 Teori Sistem Politik David Easton (Darry, 2013).

Teori pembuatan keputusan yang dikemukakan oleh David Easton tersebut, sering juga disebut dengan analisis sistem politik dalam sebuah negara, terutama dalam pembuatan sebuah kebijakan. Dengan menggunakan teori ini maka dapat diketahui bagaimana sebuah sistem politik di sebuah negara berjalan dan bagaimana prosedur pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Proses *input* atau masukan, yaitu sebuah proses dimana sebuah pemerintahan menghimpun dan menampung sekaligus masukan dari berbagai pihak maupun elemen di sebuah negara, untuk kemudian hari dijadikan bahan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Ada dua jenis *input* dalam suatu sistem politik; yaitu tuntutan dan dukungan. *Input -input* inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem politik dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem politik.

Alasan sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat karena adanya tuntutan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang tidak semuanya dapat dipengaruhi dengan memuaskan. Beberapa dari tuntutan akan hal-hal yang relatif langka itu tidak pernah masuk ke dalam sistem politik sebelum dipenuhi melalui perundingan-

perundingan pribadi atau penyelesaian-penyelesaian oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Bila tuntutan atau kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi *input-input* bagi sistem politik (Mas'oeed & Andrews, 1990).



Gambar 1. 2 Aplikasi Teori Sistem Politik David Easton (Darry, 2013).

Tuntutan - tuntutan dari dua lingkungan yaitu pertama, tuntutan eksternal yang berasal dari lingkungan diluar sistem politik. Lingkungan diluar sistem politik dipandang sebagai sistem-sistem yang mudah dibedakan satu sama lain dan mudah pula dibedakan dengan sistem politik itu, seperti ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial, dan demografi. Masing-masing sistem tersebut membantu atau dapat mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk kedalam suatu sistem politik.

Tuntutan ini juga terjadi dalam kasus ini, dimana jumlah wisatawan yang datang ke Jepang adalah mayoritas beragama Islam, maka mau tidak mau untuk mempertahankan jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang maka Jepang harus mengikuti fenomena yang terjadi. Seperti menyediakan tempat beribadah umum untuk wisatawan muslim yang datang ke Jepang, makanan halal dan lain sebagainya.

Hal ini adalah merupakan tuntutan yang mau tidak mau sistem ini akan mempengaruhi sistem politik yang ada di Jepang, dengan cara membuat sebuah kebijakan yaitu sertifikasi halal, membuat label halal untuk di taruh di bungkus makanan, snack, atau jenis-jenis halal lainnya yang wisatawan muslim bisa terima dan tidak ragu untuk mengkonsumsinya.

Lalu, tuntutan dari wisatawan secara tidak langsung ini adalah disebut tuntutan yang muncul dari luar atau eksternal dimana hal ini merupakan kebudayaan dan bukan berasal dari sistem politik Jepang dan bahkan bukan merupakan budaya, struktur sosial dari Jepang itu sendiri. Kedua tuntutan internal, yang berasal dari situasi-situasi yang terjadi dalam suatu sistem politik. Tuntutan tersebut muncul karena berbagai alasan salah satunya merubah cara amandemen konstitusi, perubahan hubungan politik diantara anggota-anggota sistem, dll dan biasanya berasal dari dalam suatu negara atau tuntutan internal, dimana tuntutan ini berasal dari masyarakat muslim yang berada di Jepang dan para pelaku bisnis di Jepang yang merasa perlu diadakannya sebuah kebijakan dari badan yang bawenang atau pemerintah untuk mencapai hasil kepentingan yang menguntungkan mereka dan juga negara Jepang (Mas'ood & Andrews, 1990).

Dari kasus yang dijelaskan diatas, kita bisa lihat pada bagan bagaimana proses itu terjadi. Kemudian jika kita lihat di bagan tersebut terdapat dukungan yang berasal dari Jepang itu sendiri, Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia Timur yang menarik untuk dikunjungi. Pemandangan alam, tata kota yang indah, taman-taman khas Jepang yang asri, atraksi wisata yang menarik, bangunan-bangunan tradisional khas Jepang serta bangunan modern seperti di Roppongi, Shinjuku, Shibuya, Tokyo Sky Tree serta bangunan modern lainnya, kuil-kuil Shinto dan Buddha, wisata kuliner, budaya serta adat-istiadatnya

membuat kagum banyak orang yang sudah pernah berkunjung ke Jepang (Merinda, 2018). Setelah melihat bahwa tuntutan yang datang dari wisatawan asing dan melihat bahwa pelaku bisnis seperti hotel di Jepang yang merasa sangat diuntungkan oleh kedatangan wisatawan asing serta peran dari para pelaku non pemerintah, maka dibuatlah keputusan kebijakan yaitu pemberian *lable* pada makanan halal dan atau sertifikasi halal dari lembaga yang mengurus Islam di Jepang. Hal ini terjadi karena perekonomian Jepang yang merosot akibat dari gempa bumi yang terjadi pada tahun 2011 yang telah menghancurkan kota-kota dan pusat perekonomian Jepang. Krisis yang terjadi pasca bencana alam tersebut merupakan krisis tersulit yang pernah dialami Jepang selama 65 tahun terakhir sejak Perang Dunia II. (Miana, Gempa Bumi Besar Jepang Timur dan Tsunami Maret 2011: Upaya Pemerintah Jepang untuk Memulihkan Pariwisata Jepang Pasca Bencana, 2013).

Jepang dituntut untuk membuka tantangan baru dengan tidak terus-terusan menghadirkan Tokyo, Osaka, Kyoto sebagai tujuan wisata, Jepang berusaha membangkitkan gairah wisata diseluruh wilayah Jepang. Pemerintah prefektur berlomba untuk menggali potensi wisata di seluruh daerah. Kebudayaan adat istiadat, tempat bersejarah sampai makanan menjadi perhatian serius bagi para penggali potensi pariwisata. (Sidabutar F. , 2017). Dengan adanya tuntutan dari internal dan eksternal yang masuk ke Jepang dan didukung oleh makanan halal sebagai alat untuk mewujudkan suatu kebijakan baru serta dukungan dari para pelaku non pemerintah, maka pemerintah Jepang tidak bisa mengesampingkan terkait sertifikasi makanan halal yang menjadi faktor pulihnya perekonomian Jepang pasca bencana.

D. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran diatas, penulis memperkirakan bahwa alasan pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan sertifikasi makanan halal pada tahun 2013 - 2019 karena:

1. Jepang memiliki kepentingan untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing khususnya muslim agar dapat meningkatkan perekonomian kembali.
2. Secara eksternal adanya tuntutan yang berasal dari lingkungan internasional yaitu wisatawan muslim asing yang mempengaruhi sistem politik Jepang terhadap kebijakan sertifikasi makanan halal.
3. Secara internal adanya tuntutan yang berasal dari masyarakat dan pelaku bisnis yang ada di Jepang atau non pemerintah untuk memberlakukan kebijakan sertifikasi makanan halal.

E. Jangkauan Penelitian

Penulis berusaha untuk membatasi tulisan ini agar fokus dan tidak kesulitan dalam mengumpulkan data. Dimana, penulis fokus kepada pemberian *lable* dan sertifikasi halal untuk produk-produk makanan Jepang serta tahun kajian adalah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dimana pada tahun 2013 diketahui mulai banyaknya jumlah wisatawan muslim yang datang ke Jepang. Seperti yang dilansir oleh sebuah berita online Indonesia, yang menyatakan bahwa *tourist office Japan* telah melihat kenaikan sebesar 37 persen dari tahun sebelumnya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang. Dan juga jumlah wisatawan asal Malaysia pun meningkat sebesar 21 persen pada tahun 2013 tersebut. Kemudian penulis berusaha meneliti kedepan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 ada banyak kenaikan jumlah wisatawan muslim di Jepang dan pada tahun 2020 akan diselenggarakannya olimpiade Tokyo 2020 dimana akan banyak sekali wisatawan muslim yang berdatangan. Maka dari itu, batasan kajian ini penulis lihat dari tahun

dimulainya meningkat jumlah wisatawan sampai dengan menuju olimpiade Tokyo 2020 (Sasongko, 2018).

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penulisan ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui alasan pemerintah atau lembaga seperti “Japan *Halal Association*” memberlakukan kebijakan sertifikasi makanan halal di Jepang.
2. Untuk memperkaya kajian ilmu hubungan internasional mengenai pemerintahan, politik, dan ekonomi Jepang dalam mempertahankan eksistensi negara dan kepentingannya. Serta memperkaya kajian ilmu mata kuliah terkait seperti: politik pemerintahan Jepang, ekonomi dan politik di Asia Timur, Metodologi ilmu hubungan internasional, dan ekonomi politik internasional.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan kerangka teori yang ditarik menjadi sebuah hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empiris yang ada (Babbie, 2008). Data yang akan digunakan adalah *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan situs-situs internet, buku, jurnal, dan berita sebagai sumber data terutama mengenai tentang *trend halal food* di Jepang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab 1 terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah pemerintah Jepang dalam memberlakukan kebijakan sertifikasi makanan halal, rumusan masalah, tujuan penelitian ini dilaksanakan, kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan mengapa pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan sertifikasi makanan halal, hipotesa atau perkiraan

sementara sebuah penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab 2 penulis menjelaskan tentang dinamika perkembangan muslim di Jepang, yang berisikan tentang sejarah masuknya Islam di Jepang, masuknya wisatawan muslim di Jepang, Kebijakan sertifikasi makanan halal di Jepang dan respon masyarakat internal Jepang terhadap masuknya wisatawan muslim di Jepang.

Pada bab 3 penulis menjelaskan tentang peningkatan jumlah wisatawan muslim yang masuk ke Jepang, dimana pada bab ini penulis menjawab sebuah hipotesa yang ada dengan beberapa penjelasan. Diantaranya menjelaskan tentang kondisi wisatawan Jepang sebelum diterapkannya sertifikasi halal, arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomiannya, lalu seperti apa kondisi wisatawan Jepang setelah diberlakukannya kebijakan sertifikasi halal tersebut.

Lalu pada bab 4, penulis menjawab hipotesa selanjutnya yaitu tentang proses mengapa pemerintah Jepang kemudian menerapkan kebijakan sertifikasi halal tersebut di Jepang. Dijelaskan kedalam beberapa bagian yaitu adanya proses input, proses perancangan kebijakan, output, dan feedback atau umpan balik yang diterima oleh Jepang setelah memberlakukan kebijakan sertifikasi halal tersebut.

Terakhir pada bab 5 penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang dirangkum dari dua bab sebelumnya.